

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran telah dimulai sejak tahun 1929 yang ditandai dengan adanya sebuah kesepakatan *Friendship Treaty*, yaitu merupakan sebuah perjanjian Arab Saudi dengan Iran yang didalamnya berisikan tentang prinsip dalam menjalin hubungan politik, perdagangan dan diplomatik. Hubungan antara Saudi dan Iran pada awalnya berjalan harmonis sampai pada akhirnya pada tahun 1944 kedua negara tersebut memutuskan hubungan diplomatiknya, ditandai dengan eksekusi mati Jemaah haji asal Iran Abu Taleb Yazdi (Rafsanjani, 2022). Putusnya hubungan diplomatik kedua negara tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1947 pemimpin Arab Saudi yaitu Raja Abd al-Aziz mengirmkan pesan tertulis kepemimpin Iran yakni Muhammad Reza Pahlavi yang isi surat tersebut tentang pemulihan kembali hubungan kedua negara (Centre & Road, 2003). Sejak itu, hubungan negara Arab Saudi dan Iran sering berada pada gangguan hubungan diplomatik secara terus-menerus disaat menjalani hubungan diplomatiknya.

Konflik perselisihan yang berlangsung antara Arab Saudi dan Iran telah berlangsung lama dan dipicu oleh sejumlah pertikaian ideologi, agama, politik, dan kekuasaan di timur tengah. Faktor yang memicu adanya perselisihan antara kedua negara tersebut meliputi perbedaan faham ideologi yaitu Arab Saudi (Sunni) dan Iran (Syiah). Ditahun 2016 hubungan diplomatik antara Riyadh dan Teheran mengalami pemutusan hubungan diplomatik kembali, hal ini disebabkan karena pihak Arab Saudi menghukum mati Syeikh Nimr al-nimr yang merupakan seorang penganut syiah yang kerap menyuarakan tindakan-tindakan protes terhadap pemerintah kerajaan Arab Saudi. Pasca terbunuhnya ulama ternama syiah tersebut warga Iran melakukan demontrasi dengan melakukan penyerangan pelemparan bom botol serta melakukan perusakan terhadap gedung kedutaan besar Arab Saudi yang berada di Iran. Atas tidakan tersebut Arab Saudi

mengambil langkah dengan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran secara resmi untuk kesekian kalinya (Aulia & Zaman, 2024).

Pasca putusnya hubungan diplomatik tersebut, Arab Saudi mengambil langkah dengan menutup akses penerbangan jalur udara Arab Saudi ke Iran. Termasuk hubungan perdagangan antar kedua negara diputus, ini selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Adel el-jubeir, menteri luar negeri Arab Saudi, *“we will also be cutting off all air traffic to and from Iran. We will be cutting off all commercial relations with Iran. And we will have a travel ban against people travelling to Iran”* (McDowall, 2016). Tetapi, dalam hal ini Arab Saudi memberikan pengecualian untuk para jemaah Haji dan Umroh bagi masyarakat Iran. Adapun dampak terhadap putusnya hubungan diplomatik kedua negara tersebut juga dirasakan oleh para mitra Saudi-Iran diluar kawasan seperti negara Indonesia yang sebelumnya sudah menjalin kerja sama dengan mengimporkan gas yang berasal dari Iran ke negara Indonesia pada 30 Juni 2016 terhambat dikarenakan Arab Saudi tidak memberi akses jalur laut kepada kapal muatan dari Iran untuk melewati jalur laut tersebut (Sinaga, 2018).

Dalam perkembangan putusnya hubungan diplomatik Saudi-Iran berdampak semakin memburuk, dimana pada kenyataannya konflik di Timur Tengah tidak terlepas dari persaingan dua kekuatan negara yaitu Arab Saudi dan Iran yang selalu terlibat dalam beberapa konflik dikawasan. Perseteruan Saudi dan Iran merupakan sebuah konflik yang terjadi untuk memperebutkan hegemoni regional Timur Tengah. Secara historis, konflik antara kedua negara tersebut disebabkan oleh perbedaan sekte Islam antara Islam Sunni dan Syiah. Masyarakat di Iran mayoritas penganut paham Syiah sekitar 85% sedangkan Arab Saudi penduduknya mayoritas penganut paham Sunni (Sahide, 2017).

Perbedaan ideologi antara Arab Saudi dan Iran menjadi semakin kompleks yang tidak pernah padam sejak berabad-abad silam. Arab Saudi dan Iran selalu berlawanan secara politik dan menyerukan setiap argumen politiknya masing-masing yang berbeda dan sering bertolak belakang (Ali, 2021). Hal ini terlihat dari perang proksi yang berlangsung di kawasan Timur Tengah seperti di negara Suriah, Irak, dan Yaman yang mengganggu stabilitas dikawasan Timur Tengah.

Dalam realitanya Arab Saudi maupun Iran selalu memberikan dukungan baik berupa dana atau pasokan persenjataan terhadap masing-masing negara yang didukung oleh kedua negara tersebut. Meskipun kedua pihak negara tersebut tidak berhadapan secara langsung, namun selalu ada keterlibatan antara Arab Saudi dan Iran dalam berbagai perang proxy di seluruh kawasan (Utami et al., 2022). Perang proxy di kawasan timur tengah khususnya di negara Yaman terlihat jelas akan keterlibatan pihak Arab Saudi dengan Iran di dalam konflik Yaman. Konflik yang berlangsung di Yaman yaitu antara Houthi dan Arab Saudi. Houthi merupakan pemberontak syiah yang berhubungan dengan Iran, sehingga kerap memberikan bantuan terhadap gerakan Syiah Houthi dengan memasokkan persenjataan rudal balistik, teknologi amunisi Iran yang canggih seperti UAV,UMV serta perang ranjau darat dan laut (Jones et al., 2021).

Melihat bahwa perselisihan Arab Saudi dengan Iran yang begitu memburuk, ini dikarenakan adanya rivalitas yang terjadi antara kedua negara yang mengakibatkan mempengaruhi situasi di kawasan Timur Tengah (Hajihosseini & Sirgany, 2017). Di suatu sisi, nampaknya memberikan kecemasan terhadap Arab Saudi sendiri, ini bisa dilihat dari *International Institute for Strategic Studies* (IISS) merupakan sebuah lembaga yang mengamati masalah militer, memberikan laporan bahwa Iran memiliki keunggulan dalam segi militer yang lebih baik dari Arab Saudi. Serta merasa terancam akan program bom nuklir serta rudal balistik yang di kembangkan Iran dan pengaruh Iran terhadap militan Houthi di Yaman dan juga organisasi-organisasi yang berbahaya di kawasan Timur Tengah (Patoni, 2021).

Kendati demikian, pemulihan normalisasi antara kedua negara Arab Saudi dan Iran kerap dilakukan oleh negara ketiga seperti Indonesia, Swiss, Oman dan Irak turut ikut serta dalam memberikan tawaran untuk menyelesaikan konflik tersebut. Normalisasi antara Saudi dan Iran sempat dilakukan olehh Irak, pada 1 Oktober 2019 Arab Saudi mengundang perdana menteri Irak ke Riyadh. Hasil dari pertemuan tersebut, pihak Arab Saudi meminta terhadap Irak agar segera untuk memfasilitasi proses menuju perundingan dengan Iran. Proses mediasi oleh Irak dengan memberikan kesempatan pertemuan antara Arab Saudi dan Iran yang

berlangsung pada 9 April 2021 di baghdad yang bertujuan agar dilakukannya kesepakatan agar segera melakukan pemulihan hubungan diplomatik (Rafsanjani, 2022). Proses dalam menuju normalisasi berjalan cukup baik dan kondusif, itu terlihat dalam beberapa pernyataan kedua belah pihak tersebut. Namun normalisasi antara Arab Saudi dan Iran belum sepenuhnya mencapai kesepakatan yang utuh dikarenakan sempat tertunda karena adanya pemilu di Irak tahun 2021.

Kelanjutan antara normalisasi kedua negara tersebut akhirnya berhasil dilakukan oleh pihak negara ketiga yaitu China. Setelah tujuh tahun perselisihan yang berlangsung antara Arab Saudi dan Iran pada akhirnya menemukan titik terang untuk melakukan normalisasi yang dilakukan di beijing, China. Proses normalisasi berlangsung secara diam-diam dan cepat selama empat hari pada tanggal 6-10 Maret 2023. Hingga pada akhirnya kedua pihak negara tersebut sepakat untuk kembali menjalin hubungan diplomatik. Kesepakatan tersebut mencakup dengan di bukanya kembali kedutaan besar di Riyadh dan Teheran (Sari, 2023).

Normalisasi Arab Saudi dan Iran adalah sebuah perkembangan penting di Timur Tengah yang bisa saja berdampak pada stabilitas dan keamanan kawasan sebagai langkah progresif dan positif bagi perdamaian karena dapat mengurangi ketegangan dan konflik bagi kedua negara tersebut yang mempunyai pengaruh yang signifikan di kawasan tersebut (Aulia & Zaman, 2024). Terjalin nya normalisasi ini, maka tidak terlepas dari kepentingan nasional atas masing-masing negara nya terutama kepentingan nasional Arab Saudi yaitu Saudi Vision 2030 yang merupakan rangkaian mengesankan dari sang putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman yang adanya rangkaian ambisius ini untuk tidak lagi bergantung terhadap sektor minyak (Derajat & Kurniawan, 2021).

Pada tahun 2015 MBS ditunjuk menjadi menteri pertahanan hingga akhirnya ditahun 2017 menjadi Putra Mahkota. Melihat posisi yang sangat strategis tersebut, maka dapat dipahami bahwa MBS merupakan penguasa de facto Arab Saudi saat ini. Dibawah kepemimpinan MBS nampaknya lebih berfokus terhadap prioritas utama Kerajaan Arab Saudi saat ini yaitu mengedepankan kesuksesan mengejar Saudi Vision 2030, karena MBS

berdasarkan dengan waktu untuk melangsungkan program-program Visi Saudi 2030 dan tidak tertarik untuk bersaing dengan Iran (Ali, 2021).

Perjalanan Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030 tentunya tidak berjalan dengan mudah, melihat bagaimana ketegangan yang terjadi dikawasan baik dari faktor internal maupun eksternal seperti masih berlanjutnya konflik dengan Iran, maka dari itu normalisasi dengan Iran merupakan salah satu jalan untuk Arab Saudi agar stabilitas kawasan mengarah pada hal yang positif untuk mempermudah jalan bagi terwujudnya Saudi Vision 2030. Kebijakan MBS dengan ikut melibatkan negaranya dalam konflik kawasan di negara-negara tetangga terbukti tidak sesuai dengan ekspektasi karena terhalang oleh keberlangsungannya proksi yang masih efektif dilakukan oleh Iran diberbagai permasalahan dikawasan Timur Tengah. Jadi, jika Arab Saudi terus berada situasi ini tanpa menemukan solusi nya dan tidak akan pernah berakhir, maka Arab Saudi harus bersiap menerima kosenkuensi cukup serius atau kerugian yang telak (Ali, 2021).

Kekhawatiran Arab Saudi dalam menghadapi tantangan Visi Saudi 2030 tidak ada yang lebih besar dari ancaman Iran terhadap stabilitas di kawasan Timur Tengah, terdapat beberapa pilar dalam Visi Saudi 2030 seperti dalam sektor pariwisata dan investasi yang bisa saja terganggu dikarenakan di takutkan para investor asing maupun wisatawan merasa tidak nyaman untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi jika kedua negara tersebut masih bersitenggang.

Dibalik adanya kontestasi antara Arab Saudi dan Iran di kawasan Timur Tengah, kedua negara sebenarnya dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan membangun jalur diplomasi dan komunikasi. Hubungan harmonis tersebut mencakup kepentingan politik, ekonomi sekte dan ideologi serta militer (Taufiq, 2018). Dengan menormalisasi hubungan dengan Iran sebagai salah satu pesaing Arab Saudi di kawasan dapat berpengaruh pada stabilitas regional dan bisa memberikan dampak terhadap perkembangan Visi Saudi 2030.

Dalam konteks ini, kajian ini akan mengetahui bagaimana pola hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran serta apa yang menjadi awal mula kedua negara berselisih. Penulis tertarik dalam mengupas normalisasi Arab Saudi dan

Iran pada tahun 2023, terlebih melihat kedua negara tersebut sebelumnya selama 7 tahun terakhir merupakan rivalitas di kawasan Timur Tengah. Serta yang mendasari penulis dalam melakukan analisa ini ialah untuk mengetahui kepentingan nasional Arab Saudi dalam melakukan normalisasi dengan Iran dibawah pemerintahan Muhammad Bin Salman.

1.2.Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut,

Mengapa Arab Saudi Menormalisasikan Hubungan Diplomatik dengan Iran?

1.3.Pembatasan Masalah

Dalam Penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada peran Arab Saudi dan Iran dalam normalisasi hubungan diplomatik. Dengan ini pembahasan akan dibatasi pada sektor historis, ideologi, ekonomi, dan kepentingan nasional, khususnya kepentingan nasional Arab Saudi dengan melakukan normalisasi dengan Iran yang merupakan rival di kawasan Timur Tengah. Pembahasan ini dibatasi oleh waktu yang berjangka tujuh tahun dimulai sejak Arab Saudi mengeksekusi hukuman mati ulama syiah syekh Nimr Al-nimr yang terjadi pada tahun 2016 dan akan dibatasi hingga 2023. Dilihat juga bagaimana pemimpin Arab Saudi Muhammad bin Salman akan mengarahkan negaranya dalam kondisi politiknya, dimana setiap keputusan bergantung pada pemimpin nya. Dari sini, dapat dilihat bagaimana Muhammad bin Salman dalam mencapai *interes* negara untuk mewujudkan kepentingan nasional nya dengan Iran.

1.4.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kepenulisan ini adalah :

1. Mengetahui dinamika hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran.
2. Mengetahui latar belakang perselisihan dan peregangannya hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran.
3. Mengetahui kepentingan Arab Saudi dalam melakukan normalisasi dengan Iran dibawah pemerintah putra mahkota Muhammad bin Salman.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis melalui kajian ini, penulis memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap disiplin Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi para peminat kajian Timur Tengah khususnya Arab Saudi dan Iran, besar harapan kajian ini bisa di pertimbangkan sebagai referensi bagi riset kedepannya.
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.